



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun 2017 menjadi tahun politik bagi warga DKI Jakarta dan berlangsung dengan cukup ‘ramai’. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan agama, ras, partai pendukung pemerintah dan oposisi yang bersebrangan, tersinggung dengan cara bicara pihak tertentu menjadi komponen yang menyebabkan ramainya Pilkada Jakarta (Hanafi, 2018, para. 3).

Berita mengenai pemilihan Gubernur DKI Jakarta sebenarnya bermunculan sepanjang tahun 2016 terkait pasangan calon pemimpin ibukota. Hasilnya, hanya tiga pasang calon yang melangkah maju. Pasangan calon (paslon) nomor urut satu ialah Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, nomor urut dua ialah petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, sedangkan mantan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno mendapat nomor urut tiga.

Hasil akhir putaran pertama membawa kemenangan untuk pasangan calon dua yakni Ahok dan Djarot, sementara pada putaran kedua dimenangkan oleh Anies-Sandi yakni paslon tiga dengan jumlah suara 58% (Nailufar, 2017). Konstituen pilkada bebas menentukan pilihan sebagaimana hak warga negara untuk

memilih yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 tentang pemilihan umum anggota dewan (Republik Indonesia, 2012, p. 5).

Rangkaian kejadian menuju Pilkada DKI Jakarta 2017 menarik perhatian publik. Mulai dari kampanye blusukan yang dilakukan ketiga pasangan calon, skandal kasus korupsi yang sempat menimpa salah satu pasangan, penolakan calon berdasarkan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), hingga aksi demo besar-besaran. Rangkaian ini melahirkan empat aksi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam antara lain aksi 411, 212, 112, dan 313 dengan tuntutan untuk memenjarakan pasangan calon yang diduga menistakan agama Islam (Subagja, 2017, para. 1).

Tidak hanya mencuri perhatian masyarakat Indonesia, tetapi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta juga menjadi sorotan media asing. Media asing memberitakan bahwa Pilkada DKI merupakan momen penting dalam perwujudan demokrasi di Indonesia yang dibumbui dengan isu toleransi antarumat beragama dalam pertarungan politik. Menurut media asal Inggris, *The Guardian* dalam Pragota (2017, para. 9) Pilkada Jakarta merupakan ajang pengujian atas nilai-nilai islam moderat dan pluralisme di Indonesia. Pragota juga mengutip *New York Times* bahwa agama dan etnis telah mengotori persaingan politik sejak awal.

Media massa asing menyoroti masalah toleransi etnis dan agama di Indonesia. Mereka melihat sosok Ahok sebagai tokoh pemberani yang mampu mengguncang sistem perpolitikan Indonesia yang dipimpin kaum elite partai (Moerti, 2016, para. 2). Mereka memandang bahwa terdapat kelompok radikal yang

mengakar di masyarakat, khususnya daerah perkotaan (Saju, 2017, para. 17). Sedangkan, Anies dilihat sebagai politisi muslim yang memanfaatkan situasi dengan mencari dukungan para ulama dan tokoh radikal ‘pinggiran’ yang menentang pemilihan non-muslim, tulis Saju dalam beritanya (2017, para. 9).

Media lokal berada pada kedua sisi yaitu pro dan kontra. Kemenangan yang diraih Anies disebut sebagai kemenangan kelompok islam garis keras (Audriene, 2017, para. 2-5). Ada pula pandangan bahwa kemenangan Anies disebabkan karena sebagian besar pemilih mementingkan kesatuan iman daripada kemampuan program (Aziz, 2017, para. 4-7). Jadi, orang memilih Anies karena seiman setaqwa daripada memilih Ahok.

Berdasarkan uraian di atas, konstituen Pilkada DKI Jakarta terbagi menjadi dua kubu besar yakni pendukung Ahok dan pendukung Anies. Masyarakat menjadi terpolarisasi akibat munculnya isu SARA (Rahadian, 2017, para. 2-3). Keseragaman pandangan meruncingkan polarisasi antara Islam dan anti Islam dalam kasus Pilkada DKI Jakarta ini (Erizaldi, 2017, para. 2). Polarisasi ini membuat mereka terjebak dalam ruang gema dari sudut pandangnya sendiri yang dikenal dengan istilah *echo chamber*.

Menurut Opini Erizaldi yang dituliskannya di Geo Times, fakta polarisasi ini dikarenakan orang mengikuti sesuatu yang dianggap benar oleh tokoh yang dipandangnya, kemudian ada *confirmation bias* yang menganggap bahwa pendapat tokoh tersebut benar karena sesuai dengan persepsinya (Erizaldi, 2017, para. 3). Menurutnya, *echo chamber* akan membuat orang menganggap pandangannya benar

dan pandangan orang lain salah. Sehingga, terciptalah polarisasi yang semakin tajam (Erizaldi, 2017, para. 5-6). Ibarat hitam akan semakin hitam, putih akan semakin putih. Kelompok satu akan makin membenci kelompok lainnya.

Gagasan mengenai *echo chamber* menyangkut percakapan *online* mengenai politik yang terbagi ke dalam kelompok grup berbeda dan terdiri dari kumpulan individu yang memiliki keserasian pandangan (Bright, 2016, p. 1). Mutz dan Martin (2001) berpendapat bahwa semakin banyak pilihan individu dalam mencari berita politik, semakin mereka mencegah munculnya opini yang mereka tidak setuju (Garret, 2009, p. 265). Fenomena *echo chamber* membuat orang lebih memilih berita yang mendukung pandangannya sehingga mengekspos hanya dari satu sudut pandang. Ketika kita mengepung diri dengan sebuah pandangan, selanjutnya pandangan tersebut yang akan terus kita dengar seperti gema. Mutz dan Martin (2001) menyatakan orang cenderung lebih suka mendiskusikan hal-hal mengenai politik yang sesuai dengan pandangannya (Garret, 2009, p. 266).

Barbera (2014) menjelaskan kemunculan *echo chamber* mengidentifikasi bahwa individu cenderung mengarah ke *homophily* (Bright, 2016, p. 3). McPhersson, Smith-Lovin, dan Cook (2001) mendefinisikan *homophily* sebagai kecenderungan dari individu yang memiliki kesamaan atau kemiripan untuk membentuk suatu ikatan dengan yang lainnya (Colleoni, Rozza, & Arvidsson, 2014, p. 2).

Kecenderungan *homophily* menjadi sumber polarisasi dan pertentangan politik. Sebab, mengurangi kesempatan perbedaan interaksi politik serta

meningkatkan interaksi dengan orang yang memiliki ideologi serupa untuk memperkuat pandangan (Boutyline & Willer, 2017, p. 3-5). Senada dengan mereka, Colleoni, Rozza, dan Arvidsson berpendapat bahwa efek dari *echo chamber* ini menyebabkan individu membentuk kelompok homogen dan menggabungkan diri dengan individu yang membagi pandangan politiknya (2014, p.2). Meskipun begitu, hal ini dianggap Boutyline dan Willer (2017, p. 8) untuk mengurangi ketidakpastian dan keragu-raguan bila dibandingkan dengan "*heterophily*". Sayangnya, *echo chamber* dikhawatirkan menimbulkan pemikiran yang tertutup bagi individu yang berdampingan dengan kehidupan pluralitas sehingga yang baik semakin baik dan sebaliknya.

Keberadaan halaman penggemar atau *fanpage* Facebook merupakan salah satu wadah bagi individu yang memiliki kesamaan atribusi. Dalam laman resmi Facebook dijelaskan bahwa halaman ini ditujukan untuk merek, bisnis, organisasi, dan tokoh masyarakat. Ketika individu menyukai sebuah halaman, maka di Kabar Berita teman mereka juga muncul pembaruan. (Facebook, Pusat Bantuan Tentang Halaman, n.d.) Artinya, *fanpage* merupakan bentuk dari ikatan antarindividu yang bersifat *homophily* serta pesannya dapat menjangkau orang-orang di sekitar individu tersebut.

Kajian ini penting karena masyarakat Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak ketiga yakni tahun 2018. Kemudian lanjutan pilkada serentak pada gelombang pertama, kedua, dan ketiga yaitu pada tahun 2020, 2022, dan 2023 menuju Pilkada serentak nasional (Adityowati, 2015, para. 3-4). Analisis Intelejen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta yang merupakan alumnus Pascasarjana Kajian

Startejik Intelejen UI memprediksi bahwa Pilkada serentak 2018 rawan perilaku intoleran dan radikal karena tidak bisa menerima perbedaan (Riyanta, 2017, para. 9).

Di samping itu, Pemilihan Presiden juga akan berlangsung pada 2019. Situasi Pilpres terdekat sudah mulai tergambar dengan kemunculan Gerakan #2019GantiPresiden yang dicetuskan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS, Sohibul Iman juga menyatakan bahwa gerakan tersebut sudah menjadi *social movement* oleh masyarakat yang menginginkan perubahan (Nathaniel, 2018, para. 3).

Direktur Indo Barometer, Muhamad Qodari mengindikasikan adanya dua kubu dalam Pilpres 2019 yakni Jokowi *versus* Prabowo (Sicca, 2018, para. 15). Ditambah lagi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pertarungan antara Ahok dan Anies dalam memperebutkan kursi Gubernur DKI merupakan pemanasan untuk pertarungan antara Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019 (Pratama, 2017, para. 1-2). Sebelumnya diketahui keempatnya memiliki hubungan politik, Jokowi dan Ahok pernah berpasangan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta selama periode 2012-2014. Sementara Prabowo secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 (Iqbal, 2016, para. 14).

Dengan demikian, dikhawatirkan adanya kemungkinan individu untuk cenderung bergaul dengan orang yang mempunyai kemiripan ideologi dan mencari kepastian untuk menguatkan keyakinannya. Padahal, menurut John Stuart Mill

(1859) perbedaan dialog mengenai suara politik merupakan kunci demokrasi (Boutyline & Willer, 2017, p.3). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti “*Homophily* pada Konten *Fanpage* Facebook Kubu Jokowi-Ahok dan Prabowo Anies”.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat kecenderungan *homophily* pada masing-masing konten *fanpage* Facebook Kubu Jokowi-Ahok dan Prabowo-Anies?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja tema konten yang dominan dari *fanpage* Facebook kubu Jokowi-Ahok dan Prabowo-Anies?
2. Apa saja tipe konten yang dominan dari *fanpage* Facebook kubu Jokowi-Ahok dan Prabowo-Anies?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tema yang sering dibicarakan pada *fanpage* Facebook kubu Jokowi-Ahok dan Prabowo-Anies.

2. Untuk mengetahui tipe yang sering digunakan pada *fanpage* Facebook kubu Jokowi-Ahok dan Prabowo-Anies.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Memberikan hasil pemikiran dalam bidang jurnalistik dan dialog politik dalam jaringan *online* mengenai kecenderungan *homophily* dalam konteks Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait perilaku *echo chamber* yang terjadi di masyarakat Indonesia. Selain itu, melengkapi penelitian mengenai *echo chamber* yang cenderung mengarah pada sikap *homophily* yang terjadi di berbagai belahan dunia.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Digunakan untuk memberi gambaran situasi politik yang terjadi di Indonesia agar masyarakat terhindar dari sikap intoleran dan tidak menerima perbedaan. Perilaku *echo chamber* membuat individu mengabaikan opini yang bertentangan sehingga mengarah pada kecenderungan *homophily*. *Homophily* biasanya terdiri dari individu yang berpandangan ekstrim atau konservatif dan memberikan efek negatif pada toleransi serta pemahaman yang tidak merata

(Boutyline & Willer, 2017, p. 27). Padahal, bentuk pemerintahan Indonesia berlandaskan demokrasi dan perbedaan mengenai pandangan politik merupakan kuncinya.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Digunakan sebagai bahan evaluasi individu untuk mempersiapkan sikap pada pemilihan umum selanjutnya, seperti Pilkada serentak, Pilpres, maupun Pemilihan Legislatif. Hasil dari penelitian ini juga berfungsi sebagai pertimbangan untuk antisipasi diri dalam mengkonsumsi berita.

1.6 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan hanya melalui konsumsi media *online*. Jadi, ada peluang bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti perilaku *echo chamber* melalui *platform* media lain.
2. Adanya batas postingan maksimal 999 postingan dari aplikasi Netvizz.
3. Adanya gangguan pada Facebook karena skandal *Cambridge Analytica* sehingga ada fitur Netvizz yang tidak bisa digunakan.
4. Penulis memiliki keterbatasan waktu dan kemampuan untuk meneliti konten postingan yang begitu dinamis pada Facebook.